

SKRIPSI

**Analisis Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23
dan Pasal 4 ayat 2 pada PT NICK Tahun 2020**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : RENNY WESLYN

NPM 125180056

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2021

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RENNY WESLYN
NPM : 125180056
PROGRAM/ JURUSAN : S1/ AKUNTANSI BISNIS
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23
DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT NICK
TAHUN 2020

Jakarta, 25 Desember 2021

Pembimbing



(Purnamawati Helen Widjaja Dra., M.Si)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RENNY WESLYN
NPM : 125180056
PROGRAM/ JURUSAN : S1/ AKUNTANSI BISNIS
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23
DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT NICK
TAHUN 2020

Ketua Panitia : Sofia Prima Dewi S.E., M.Si., Ak., CA.
Anggota Panitia : Purnamawati Helen Widjaja Dra., M.Si
Anggota Panitia : Lukman Surjadi Drs., M.M

Jakarta, 19 Januari 2021

Pembimbing



(Purnamawati Helen Widjaja Dra., M.Si)

ABSTRAK

Abstract: *This research aims to find out how the NICK company which is engaged in cold storage rental has carried out its tax obligations as stipulated in the current tax regulations in Indonesia. This study was also conducted to test compliance with the deposit and reporting of PT NICK's Tax Period Tax Return on these three tax aspects in fulfilling their tax obligations as corporate taxpayers. This study uses a qualitative method. Qualitative methods are research methods based on post-positivity, which are used to study the state of natural objects where researchers will use them as key instruments, data collection techniques that are carried out in a combined manner. This type of research uses descriptive research and the data sources used are secondary data and primary data. The results of this study indicate that PT NICK has carried out its tax obligations on these three aspects and is in accordance with the applicable tax regulations. The three aspects of taxation include PPh 21, PPh 23 and PPh 4 paragraph 2. However, it appears that PT NICK's calculations and withholdings have been found to have underpaid income tax article 21 from January to December 2020.*

Keywords: *Tax Withholding, Tax Reporting, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax and Article 4 paragraph 2 Income Tax.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan NICK yang bergerak pada bidang persewaan *coldstorage* telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji kepatuhan pada penyeteroran serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak PT NICK terhadap tiga aspek pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak badan. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada *post-positivity*, yang dipergunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam dimana peneliti akan menggunakannya sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT NICK sudah melaksanakan kewajiban perpajakan atas tiga aspek tersebut dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tiga aspek perpajakan tersebut diantaranya adalah PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Namun, terlihat bahwa perhitungan dan pemotongan PT NICK telah ditemukan kurang bayar pada pajak penghasilan pasal 21 dari masa Januari hingga sampai Desember 2020.

Kata Kunci: *Pemotongan Pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada PT NICK Tahun 2020**

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses pembuatan skripsi.
2. Dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan penjelasan selama proses pembuatan skripsi.
3. Kedua Orangtua saya tercinta dan Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a setiap waktu.
4. Seluruh anggota keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Pimpinan kantor PT NICK dan pegawai kantor PT NICK.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga laporan ini selesai dengan baik.

Jakarta, 2 Desember 2021

Penulis



Renny Weslyn

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah.....	5
4. Rumusan Masalah.....	5
B. Tujuan dan Manfaat.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Gambaran Umum Teori.....	7
1. Pajak.....	7
2. Pajak Penghasilan.....	9

3. Pajak Penghasilan Pasal 21	12
4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	23
B. Kerangka Penelitian	27
C. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Desain Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
1. Subjek Penelitian.....	29
2. Objek Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Pengelolaan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	33
1. Deskripsi Subjek Penelitian.....	33
2. Visi dan Misi PT NICK.....	33
3. Struktur Organisasi.....	34
B. Deskripsi Objek Penelitian	35
C. ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT NICK.....	35
1. Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan 21	35
2. Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan 23	45

3. Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan Final	
Pasal 4 ayat (2).....	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
SURAT PERNYATAAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tarif PPh Pasal 17 Wajib Pajak Orang Pribadi	16
Tabel 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	16
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1. Perhitungan PPh 21 yang penghasilan neto-nya telah melebihi PTKP menurut PT NICK.....	36
Tabel 4.2. Perhitungan PPh 21 yang penghasilan neto-nya tidak melebihi PTKP menurut PT NICK.....	37
Tabel 4.3. Perhitungan PPh 21 yang penghasilan neto-nya tidak melebihi PTKP menurut PT NICK.....	39
Tabel 4.4. Perhitungan PPh 21 yang penghasilan neto-nya tidak melebihi PTKP menurut PT NICK.....	40
Tabel 4.5. Penyetoran PPh 21	41
Tabel 4.6. Pelaporan PPh 21	43
Tabel 4.7. Bukti Potong PPh 23 PT NICK	46
Tabel 4.8. Tanggal Penyetoran pada PT NICK.....	48
Tabel 4.9. Tanggal Pelaporan pada PT NICK.....	50
Tabel 4.10. Perhitungan Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....	52
Tabel 4.11. Perhitungan Pemotongan pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Kepada Pihak Lain	54
Tabel 4.12. Penyetoran PPh Final 4 Ayat 2	56
Tabel 4.13. Pelaporan PPh Final 4 Ayat 2.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia artinya negara berkembang yang memiliki kekayaan yang berasal dari sumber daya yang berlimpah serta memiliki potensi yang baik untuk menjadikan negara semakin maju. Namun, saat ini Indonesia belum bisa memaksimalkan sumber daya serta potensi yang ada untuk membuat negara semakin maju. Terdapat banyak aspek yang dapat membuat negara Indonesia menjadi semakin buruk bila dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu aspek utamanya yaitu ekonomi.

Kita dapat melihat bahwa pendapatan negara Indonesia berasal dari dua sektor yaitu sektor eksternal dan sektor internal. Pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman dari luar negeri, sedangkan pendapatan sektor internal berasal dari pajak. Karena berhubung pinjaman negara Indonesia ke luar negeri sangat tinggi, sehingga pemerintahan Indonesia mengharapkan pajak sebagai sumber ekonomi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah – masalah ekonomi yang ada.

Pendapatan pemerintah berasal dari dua sumber penghasilan yaitu penghasilan bukan pajak dan penghasilan pajak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar pada negara Indonesia. Sehingga untuk memperkaya kehidupan masyarakat negara Indonesia, pemerintah mewajibkan agar setiap wajib pajak menyadari kepatuhannya dalam membayar pajak.

Karena pajak merupakan pendapatan terbesar di negara Indonesia, sehingga pemerintah perlu pengawasan dalam menangani pemasukan perpajakan di pemerintah. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan pemungutan pajak di negara Indonesia. Saat memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, wajib pajak menggunakan sistem *self-assessment*.

Penerapan sistem *self-assessment* dilakukan karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga menjadi kesadaran wajib pajak buat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan *self-assessment*, masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat tentang penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, namun banyaknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal yang biasa sering terjadi pada wajib pajak adalah banyaknya wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang disebut dengan sistem pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berupa pajak penghasilan 15, pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 22, dan pajak penghasilan 4 ayat (2).

PT NICK adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan *coldstorage*. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT NICK berkewajiban untuk menghitung, memotong dan melaporkan pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut nantinya akan dipotong dalam SPT Tahunan Wajib Pajak.

Karena PT NICK mempekerjakan orang, maka setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan PT NICK akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh PT NICK tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang dikenakan kepada karyawan adalah Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21. Penghasilan karyawan dipotong dari perusahaan karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya.

Pemotongan pajak penghasilan akan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu tahun yang diserahkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jika setelah melakukan penyetoran akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, nantinya akan dilakukan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak tempat perusahaan tersebut didaftarkan.

Salah satu pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun adalah pajak penghasilan 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau kegiatan lainnya yang telah dipotong pajak.

Perhitungan pajak penghasilan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan 23 harus dilakukan secara teliti dan hati-hati untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian wajib pajak karena kurangnya penghasilan dari sektor pajak. Menurut pasal 23, mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta.

Namun, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset yang dikenakan pajak penghasilan tidak termasuk.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) pada peraturan pemerintah, jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu, penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa usaha jasa konstruksi, usaha real estate, tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa persewaan bangunan. maka penghasilan perusahaan atas persewaan bangunannya akan dikenakan pajak penghasilan final yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan 4 ayat (2) mempunyai peranan penting dalam usaha karena dari pencatatannya tersebut digunakan oleh departemen-departemen di dalam maupun departemen-departemen di luar usaha untuk menentukan besarnya jumlah penerimaan penghasilan bruto dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sehingga dapat menggambarkan jumlah penghasilan bruto dari penghasilan atas sewa bangunan kepada perusahaan lain.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 DAN Pasal 4 AYAT (2) PADA PT. NIK TAHUN 2020”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman kewajiban perpajakan yang masih rendah
- b. Tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak pada kewajiban perpajakan.
- c. Perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 4 ayat (2) yang masih salah.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu kewajiban perpajakan pada pph 21, kewajiban perpajakan pada pph 23 dan kewajiban perpajakan pada pph 4 ayat (2).

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- a. Apakah penghitungan pajak penghasilan pasal 21, 23, 4 ayat (2) pada PT. NICK tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak?
- b. Apakah proses penyetoran/ pemotongan pajak penghasilan pasal 21, 23, 4 ayat (2) pada PT. NICK tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak?
- c. Apakah proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23, 4 ayat (2) pada PT. NICK tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah PT. NICK sudah melakukan kewajiban perpajakannya.

- b. Untuk mengetahui apakah PT. NICK telah melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21
- c. Untuk mengetahui apakah PT. NICK telah melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23
- d. Untuk mengetahui apakah PT. NICK telah melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam peraturan perpajakan.

b. Manfaat bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi perusahaan dalam meningkatkan kewajiban perpajakan terhadap pengeluaran pajak.

c. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan penelitian aspek-aspek perpajakan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 4 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

2008. Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta Andi. Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang *Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisis Delapan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, N. (2017). *Penerapan Pajak Penghasilan Spt Masa Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Waluyo, (2017), *Perpajakan Indonesia* ,Salemba Empat, Jakarta.